



RENCANA STRATEGIS 2025-2030

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)

Mendorong reformasi kebijakan, tata kelola lembaga
yang baik, dan perlindungan kelompok rentan yang
berbasiskan bukti

RENCANA STRATEGIS IJRS

Teori Perubahan IJRS 2025 - 2030

Visi	Dampak Perubahan (<i>Outcomes</i>)	Tujuan (<i>Objectives</i>)
IJRS sebagai lembaga <i>think tank</i> terdepan yang inklusif dan berintegritas untuk mewujudkan sistem hukum Indonesia yang adil, transparan, rasional, dan aksesibel bagi semua.	Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum	1. Terwujudnya transformasi kelembagaan hukum yang efektif, bersinergi, dan adaptif 2. Adanya anggaran yang efisien, tepat guna, dan sesuai kebutuhan masyarakat 3. Terciptanya SDM yang profesional, unggul, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM
	Terwujudnya Pelayanan Hukum yang Berperspektif HAM	1. Sistem pelayanan hukum yang akuntabel, profesional, dan bersinergi 2. Pelayanan hukum yang aksesibel, inklusif, berkualitas, & mengedepankan pemulihan korban

	Menguatnya Budaya Hukum Masyarakat dan Pemerintah	1. Terwujudnya kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukum di komunitasnya sesuai dengan nilai-nilai HAM 2. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dan penyelenggara negara terhadap produk hukum 3. Tersedianya sarana informasi dan pengetahuan hukum yang aksesibel 4. Adanya pendampingan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dan penyelenggara negara secara berkala
	Terwujudnya Penghukuman yang Proporsional	1. Adanya pengambil kebijakan yang kompeten terkait isu penghukuman yang proporsional 2. Isu penghukuman yang proporsional menjadi populer 3. Adanya metode penentuan penghukuman yang proporsional dalam proses legislasi
	Terwujudnya Kebijakan Publik yang Berbasis pada Kebutuhan Masyarakat	1. Adanya kemampuan K/L & masyarakat sipil dalam melakukan <i>needs assessment</i> & monitoring evaluasi kebijakan public 2. Terdapat sistem (kebijakan, sarpras, anggaran,dll) yang aksesibel terhadap penyusunan kebijakan public 3. Masyarakat memiliki kesadaran dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam menyusun kebijakan

	Terwujudnya Organisasi Berkelanjutan Berkualitas yang dan	1. Adanya SDM di internal lembaga yang berkualitas untuk mendorong inovasi dan efisiensi kerja 2. Terwujudnya pengelolaan produk pengetahuan lembaga yang tepat guna dan berkelanjutan 3. Terwujudnya tata kelola internal lembaga yang segar (<i>updated</i>), efektif, efisien, dan akuntabel 4. Adanya diversifikasi pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan
--	---	--



Indonesia Judicial Research Society